



Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (*Hoax*) di Media Sosial

Oleh:

Vibriza Juliswara¹

Abstraksi

Ujaran kebencian (*hate speech*) mengiringi kebebasan berpendapat di media sosial. Sejak pilpres 2014 lalu, istilah 'hater' pun dikenal luas, yang menandai orang-orang dengan kecenderungan membuat pesan ujaran kebencian pada orang atau kelompok tertentu. Kebhinnekaan sebagai pengikat sosial diuji karena kecenderungan praktik ujaran kebencian yang dipromosikan melalui media sosial. Kondisi itu diperparah oleh penyalahgunaan media sosial seperti persebaran berita bohong atau informasi palsu (*hoax*) yang dampaknya menimbulkan permusuhan dan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang mengutamakan toleransi. Dalam rangka merespon berkembangnya ujaran kebencian, kajian ini mencoba untuk mengembangkan suatu model literasi media yang berkebhinnekaan dalam menganalisis informasi palsu (*hoax*) dalam berita di media sosial. Melalui pengembangan model kajian literasi media sebagai pendekatan yang memberdayakan pengguna media sosial (*netizen*) maka diasumsikan para netizen akan lebih mampu mengkonstruksi muatan yang positif dalam memanfaatkan media sosial.

Kata kunci: literasi media-berkebinnekaan, media sosial, informasi berita palsu (*hoax*)

Abstract

Hate speech accompanies freedom of speech on social media. Since the 2014 presidential election, the term 'hater' was well known, marking people with a tendency to create hate messages addressed to particular individuals or groups. The Indonesian sense of managing diversity (Kebhinnekaan) is thus under scrutiny due to the practices of hate speech promoted by social media. The condition of free speech is aggravated by social media abuse by false news and false information (*hoax*), both of which resulted in hatred and thus are unsuitable with Indonesian culture which promotes tolerance. As a response to the growing hate speech, this study aims to examine a model of media literacy based on promoting the values diversity in analyzing false information (*hoax*) on social media. By developing a model of media literacy as an approach to empower the netizens of social media, the netizens are assumed to be able to construct positive contents of utilizing social media.

Keywords: promoted diversity - media literacy, social media, false information (*hoax*)

A. Pendahuluan

Pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang luar biasa. Meski begitu, perkembangan teknologi informasi kehidupan di

dunia nyata tidak paralel dengan kehidupan di dunia maya. Media sosial kini dipenuhi berita informasi palsu (*hoax*), provokasi, fitnah, sikap intoleran dan anti Pancasila. Kemajuan teknologi di era globalisasi membuat informasi begitu cepat

¹ Vibriza Juliswara adalah staf pengajar di Program Studi Sosiologi STISIP Kartika Bangsa Yogyakarta

beredar luas. Keberadaan internet sebagai media online membuat informasi yang belum terverifikasi benar dan tidaknya tersebar cepat. Hanya dalam hitungan detik, suatu peristiwa sudah bisa langsung tersebar dan diakses oleh pengguna internet melalui media sosial. Melalui media sosial, ratusan bahkan ribuan informasi disebar setiap harinya. Bahkan orang kadang belum sempat memahami materi informasi, reaksi atas informasi tersebut sudah lebih dulu terlihat.

Memang, media sosial memberikan kemerdekaan seluas-luasnya bagi para pengguna untuk mengekspresikan dirinya, sikapnya, pandangan hidupnya, pendapatnya, atau mungkin sekadar menumpahkan unek-uneknya. Termasuk memberikan kebebasan apakah media sosial akan digunakan secara positif atau negatif. Kita patut prihatin dengan kondisi saat ini, cukup banyak orang yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian dan provokasi.

Keadaan tersebut di satu sisi bisa menjadi potensi yang menguntungkan, namun di sisi lainnya bisa menjadi sebuah ancaman atau setidaknya malah memberikan dampak negatif yang mengarah pada perpecahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini penyebaran berita ujaran kebencian, bentuk-bentuk intoleransi dan informasi palsu (*hoax*) sedang marak menghiasi jagad media sosial Indonesia. Hal ini berlangsung khususnya pada situasi politik tertentu, misalnya pada saat Pemilu, Pilpres dan pada masa Pilkada serentak di beberapa wilayah di Indonesia, dimana terdapat indikasi adanya persaingan politik dan kampanye hitam yang juga dilakukan melalui media sosial.

Masyarakat sebagai konsumen informasi bisa dilihat masih belum bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang palsu atau *hoax* belaka. Beberapa faktor mempengaruhi terjadinya hal ini diantaranya yaitu ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijaksana. Dengan mengatasnamakan kebebasan para pengguna internet dan media sosial khususnya banyak netizen yang merasa mempunyai hak penuh terhadap akun pribadi miliknya. Mereka merasa sah-sah saja untuk menggunggah tulisan, gambar atau video apapun ke dalam akunnya. Meskipun terkadang mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka unggah tersebut bisa saja melanggar etika berkomunikasi dalam media sosial.

Kegaduhan yang terjadi di media sosial dinilai bisa merambat ke dunia nyata jika tidak segera diatasi. Perbincangan yang terdapat di media sosial berpotensi mengkonstruksi pemahaman publik mengenai suatu hal dalam kehidupan masyarakat. Kegaduhan di media sosial dapat berdampak dalam kehidupan riil karena media sosial ini juga membentuk konstruksi pemaknaan tentang asumsi sosial kita. Kegaduhan yang terjadi di media sosial semacam itu kerap kali menggunakan sentimen identitas yang bermuara pada hujatan dan kebencian dan karenanya dapat melunturkan semangat kemajemukan yang menjadi landasan masyarakat dalam berbangsa. Pada akhirnya konsep tentang kebhinnekaan mengalami dekonstruksi oleh argumen-argumen yang ikut dibentuk melalui media sosial. Dalam merespon persoalan semacam itu, Kemenkominfo diharapkan dapat merumuskan konsep yang sesuai dalam mengantisipasi terjadinya kegaduhan di media sosial. Di sisi lain, persoalan mengatasi kegaduhan di media sosial melalui

penegakan hukum juga tidak perlu merusak semangat kebebasan berekspresi dalam sistem yang demokratis.

Kondisi semacam itu pula menjadi tuntutan bagi pemerintah untuk merumuskan konsep pendidikan literasi berbasis multikulturalisme kepada masyarakat. Konsep-konsep yang didasari oleh nilai-nilai primordialitas itu harus perlahan dikikis melalui reaktualisasi konsep kebhinnekaan. Dengan demikian, kerukunan berbangsa masyarakat Indonesia dapat dipelihara sebaik mungkin. Masyarakat Indonesia saat ini umumnya senang berbagi informasi. Dibarengi dengan perkembangan teknologi digital yang penetrasinya cukup tinggi dan menjangkau hingga berbagai kalangan, maka peredaran informasi menjadi kian sulit terbendung. Namun, rupanya hal ini menimbulkan suatu polemik baru. Informasi benar dan salah menjadi campur aduk. Banyak netizen di Indonesia memiliki kecenderungan berlomba-lomba melemparkan isu dan ingin dianggap yang pertama. Hal ini nampak dalam pengiriman pesan melalui aplikasi WhatsApp, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Meski demikian, persoalan persebaran informasi palsu atau *hoax*, tak hanya menjadi permasalahan di Tanah Air, tetapi menjadi isu global. Dalam konteks semacam itu, kini pemerintah harus berfokus pada 'hulu' persebaran informasi palsu itu, dan bukan hanya melakukan pembatasan atau pemblokiran, melainkan lebih kepada bagaimana mengembangkan literasi masyarakat. Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial. Misalnya, memastikan terlebih dahulu akurasi konten yang akan dibagikan, mengklarifikasi kebenarannya, memastikan manfaatnya, baru kemudian menyebarkannya.

Kebiasaan berbagi secara cepat juga mempengaruhi pola baca masyarakat yang juga ikut berubah total. Jika membaca buku halaman berapa, dan koran alinea berapa, pembaca berita online cenderung membaca secara cepat. Hal itu didukung oleh industri media itu sendiri dalam menyajikan format berita online. Portal berita yang paling banyak dibaca adalah yang memiliki kecenderungan menampilkan isi (konten) berita yang hanya terdiri dari beberapa alinea, bahkan penyajiannya cenderung tak lengkap dalam satu berita. Untuk mendapatkan informasi lengkap, pembaca dipaksa untuk membaca lebih dari satu berita. Banyaknya persebaran *hoax* bahkan dapat membuat kelompok terpelajar sekalipun tidak bisa membedakan mana berita yang benar, *advertorial* dan *hoax*.

B. Metode Penelitian, Perumusan Masalah dan Kerangka Teoritis

Penelitian terdahulu mengenai literasi media telah dilakukan oleh Marfiah Sri Sanityastuti (2014) menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai inteligensia yang kritis dalam menghadapi keberhasilan TV mempengaruhinya, mereka bisa memilih tayangan yang menjadi kebutuhannya. Menonton bukan berarti dipaksa tunduk pada hal-hal yang ditonton. Masyarakat pandai mengkontruksi dan reproduksi dirinya terus menerus agar membentuk peradaban yang bermartabat.

Penelitian selanjutnya yang telah dilakukan oleh Annisa Aninditya (2012) mengemukakan tentang proses pemberitaan media siber tidak sama dengan

media cetak. Media siber dituntut segala hal berlangsung cepat. Dalam pemberitaan media Detikcom terdapat kesalahan dalam pemberitaan tentang seorang WNI tewas di Mesir. Tanpa verifikasi ke sumber resmi seorang wartawan menulis berita tersebut. Ada mekanisme yang tidak tepat dalam proses pencarian informasi dan pengolahan berita. Detikcom seakan ingin menunjukkan bahwa mereka selalu berusaha menjadi cepat dan pertama mempublikasikan sebuah isu. Namun pada pemberitaan ini detikcom tidak menguji informasi atau melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi tersebut. Kemudian Detikcom juga dianggap memuat berita bohong, walaupun bukan yang membuat berita bohong. Meskipun berita ini sudah memenuhi elemen bahwa jurnalis harus berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan relevan, namun kurang pada elemen yang menyebut jurnalis harus menjaga berita dalam proporsi dan menjadikannya komprehensif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bertujuan menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Pendekatan kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus intrinsik (*intrinsic case studies*). Menurut John W. Creswell (2015) studi

kasus merupakan strategi penyelidikan, dimana peneliti mengeksplorasi dan memahami secara mendalam terhadap sebagian atau keseluruhan dari program, acara, aktivitas, maupun proses.

Selain itu, penelitian ini mengembangkan suatu penggunaan model literasi informasi yang dikenal sebagai model '*Empowering Eight*' atau E8' karena mencakup 8 komponen dalam menemukan dan menggunakan informasi (Wijetunge, P. & Alahakoon, U, 2009; Sulisty Basuki, 2013). *Model Empowering Eight* (E8) menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk mengolah sumber informasi sebagai basis pembelajaran atau *resource-based learning*. Secara khusus, studi kasus yang dikembangkan dengan mempraktikkan model '*Empowering Eight*' atau E8 ini memilih polemik atas berita *hoax* mengenai '*Serbuan Orang Cina ke Indonesia*' yang menjadi perdebatan publik sejak pertengahan tahun 2016.

Literasi media seringkali diterjemahkan secara sederhana dengan '*melek media*'. Pandangan semacam ini dianggap menyederhanakan persoalan pengembangan kapasitas literasi media, karena apabila dianalogikan dengan melek huruf maka literasi media dapat diartikan hanya sebagai '*sekedai*' tidak buta media. Perkembangan media yang sangat cepat terutama media massa harus diimbangi dengan gerakan literasi media yang komprehensif. Agar sebagian besar dari masyarakat dapat memanfaatkan media massa untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Melalui pengembangan kajian literasi media, maka diharapkan masyarakat dapat membedakan konten media yang bermanfaat dan yang menimbulkan mudharat atau kerugian bagi kehidupannya.

Pembahasan kajian mengenai literasi media dalam kajian ini adalah dengan cara mempraktikkan suatu model literasi media yang didasari oleh nilai-nilai keragaman masyarakat Indonesia yang berkebhinnekaan (mengutamakan toleransi dan persatuan bangsa) dalam menganalisis informasi palsu (*hoax*) khususnya yang dimuat dalam berita media sosial dan dibagikan atau tersebar melalui media sosial. Upaya untuk mempromosikan nilai-nilai dan karakter kebhinnekaan ini memberi panduan bagaimana masyarakat dapat menjalankan kehidupan berbangsa yang harmonis. Dengan kata lain, menghindarkan saling caci, saling hujat, saling tuduh, bahkan saling meliyankan atau mengkafirkan. Melalui karakter kebhinnekaan akan lahir bentuk kerjasama lintas keragaman dalam membangun bangsa dan negara Indonesia.

C. Pendekatan Sosiologis terhadap Fenomena Informasi Palsu (*Hoax*)

Sosiologi memfokuskan perhatian dan menganalisis hubungan atau interaksi antar manusia dalam suatu masyarakat, yaitu bagaimana mereka berkomunikasi, bekerja sama, dan berupaya mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Masalah *hoax* yang muncul dan menjadi topik hangat di tengah kehidupan masyarakat beberapa waktu terakhir ini menunjukkan perkembangan masyarakat yang semula lebih sederhana menuju kondisi modernitas yang semakin kompleks. Masyarakat memasuki budaya baru yang belum sepenuhnya disadari kelebihan maupun kelemahannya. Apa yang dialami masyarakat saat ini adalah belum adanya pemahaman tentang bagaimana menggunakan media sosial dan

mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya. Media sosial seolah-olah membawa masyarakat ke wilayah luas dan hampir tanpa batas dalam berkomunikasi. Kondisi yang tanpa tatap muka namun cepat tersaji dalam mengantarkan pesan ini kemudian berkembang pesat dan bahkan cenderung berkembang secara liar. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian orang yang kurang bertanggung jawab guna menebarkan informasi palsu (*hoax*) untuk menyerang pribadi orang lain demi kepentingan diri dan, atau kelompoknya.

Kemunculan media sosial bukan saja menjadi sarana yang mudah untuk menghubungkan antar manusia, namun juga mengakibatkan semakin mudah tersebarnya informasi palsu (*hoax*). Masalah persebaran informasi palsu (*hoax*) di media sosial melalui media sosial mungkin belum pernah sepenuhnya dibayangkan oleh para pakar teknologi informasi dan komunikasi, karena pada awalnya kemunculan media sosial dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi antar manusia di berbagai belahan dunia. Dari sudut pandang sosiologis keberadaan media sosial terutama kemunculannya telah mempengaruhi tata cara manusia berkomunikasi, bersosialisasi, berteman, dan berinteraksi.

Berdasarkan konsep sosiologi yang memandang masyarakat sebagai kelompok manusia yang menghasilkan kebudayaan yang berkaitan dengan perkembangan peradaban masyarakat, dalam konteks merebaknya persebaran *hoax*, masyarakat dapat mengalami kemunduran moral yang dapat membahayakan peradaban khususnya bagi masa depan generasi muda. Masa depan apa yang akan

didapatkan oleh anak-anak dan remaja yang sejak kecil telah menyaksikan bahkan mengakses dan mempercayai keberadaan informasi palsu (*hoax*)? Edukasi berperan dalam mengembangkan literasi media melalui aktivitas yang menekankan pada aspek mensosialisasikan bagaimana cara mengakses, memilih program yang bermanfaat dan sesuai kebutuhan yang lebih menjadi prioritas dalam memecahkan kehidupan dalam keseharian. Permasalahannya yang menjadi tantangan adalah seiring dengan derasnya arus informasi media, masyarakat pun dibuat kebingungan dan tidak mampu memilah, menyeleksi, serta memanfaatkan informasi yang sudah mereka peroleh.

Menurut Laporan '*National Leadership Conference on Media Education*' (Aufderheide, 1992) menyatakan pentingnya literasi media sebagai kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi dan mengkomunikasikan pesan dalam pelbagai bentuknya. Sementara itu dalam konteks di Indonesia, terdapat regulasi yang juga membahas tentang literasi media yakni di dalam Undang-undang No.32 Tahun 2003 tentang Penyiaran, khususnya dimuat di dalam Pasal 52 yang memaknai literasi media sebagai "*kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat*" (Iriantara, 2009: 25). Pada sisi lain, aspek pendidikan dalam literasi media merupakan bentuk pemberdayaan khalayak media. Hal ini sesungguhnya terkait dengan tujuan pendidikan literasi media yang tidak lagi bertujuan untuk semata-mata melindungi khalayak media sebagai konsumen produk yang dihasilkan industri media, tetapi juga mempersiapkan khalayak sebagai konsumen media untuk hidup di dunia yang dunia sosialnya sangat bergantung pada media massa.

Oleh karena itu, salah satu prinsip dalam pendidikan literasi media adalah memberdayakan khalayak. Disebut memberdayakan karena model literasi media menjadi kompas baru dalam mengarungi dunia media yang luas, sehingga orang tidak akan menjadi korban media (Brow, dalam Iriantara, 2009: 13).

Tujuan literasi media adalah memberi kita kontrol yang lebih besar atas interpretasi terhadap muatan pesan media yang merupakan hasil dari suatu konstruksi kepentingan. Berkenaan dengan kepentingan untuk pemberdayaan khalayak diperlukan juga media untuk membangun khalayak yang berdaya tersebut. Hal ini berkenaan dengan tujuan untuk mencapai upaya melampaui melek-media.

Dari sisi tujuan literasi media, ada dua pandangan utama yang berbeda dan memiliki pengaruh yang sama kuatnya di kalangan praktisi pendidikan media dan para penggiat literasi media (Aufderheide, 1992) yaitu:

(1) Pandangan pertama yang disebut kelompok '*proteksionis*' menyatakan, pendidikan media atau literasi media dimaksudkan untuk melindungi warga masyarakat sebagai konsumen media dari dampak negatif media massa.

(2) Pandangan kedua yang disebut '*preparasionis*' yang menyatakan bahwa literasi media merupakan upaya mempersiapkan warga masyarakat untuk hidup di dunia yang sesak-media agar mampu menjadi konsumen media yang kritis. Artinya, dalam pandangan kelompok preparasionis, warga masyarakat secara umum perlu dibekali oleh

kompetensi melek media untuk bisa mengambil manfaat dari kehadiran media massa.

Perubahan pola komunikasi yang terjadi dalam masyarakat saat ini di ruang siber memang memberikan dampak pada perilaku kehidupan masyarakat moderen. Kehadiran media siber merupakan bentuk cara baru dalam berkomunikasi. Bila selama ini pola komunikasi yang telah mapan terdiri dari pola *'one-to-many audiences'* atau dari satu sumber ke banyak pemirsa (seperti buku, radio, dan televisi), dan pola *'one-to-one audience'* dari satu sumber ke satu pemirsa atau (seperti telepon dan surat), maka pola komunikasi masyarakat siber menggunakan kombinasi pola *'many-to-many'* dan pola *'few-to-few'*.

Realitasnya yang ada saat ini, kemunculan media sosial tidak hanya digunakan untuk sekedar bersosialisasi semata namun juga sudah meluas menjadi sarana bertukar informasi, berbisnis (jual-beli, dan iklan), berkampanye, mengajukan protes, ajakan berdemonstrasi, bahkan mencari jodoh (*dating*). Media sosial yang paling berpengaruh dalam hal ini misalnya Instagram dan Facebook. Sebagian besar masyarakat saat ini, setidaknya akan memiliki satu akun Instagram dan satu akun Facebook dalam aplikasi yang dimilikinya di dalam telpon selulernya (*mobile phone* atau *smartphone*). Bahkan bagi sebagian lain masyarakat yang menjalankan bisnis online mereka akan memiliki lebih dari satu akun dalam satu jenis media sosial. Banyaknya akun-akun pada media sosial ini akan memberikan implikasi pada semakin cepatnya penyebaran dari sebuah konten atau informasi. Kini tidak sulit lagi untuk mendapatkan informasi dari

berbagai tempat meskipun peristiwa tersebut baru saja terjadi.

Faktor selanjutnya adalah adanya semacam euforia dalam menggunakan internet dan media sosial. Seperti kita ketahui sebelum adanya reformasi, masyarakat di Indonesia mengalami keterbatasan dalam mengekspresikan pendapat dan berdemokrasi. Tetapi, semenjak reformasi bergulir masyarakatpun seakan mendapat angin segar untuk secara lebih bebas menyatakan aspirasi dan pendapat-pendapat mereka terkait persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, bahkan persoalan keseharian dalam kehidupan pribadi mereka. Banyak masyarakat yang memang secara arif bisa menyampaikan aspirasi mereka melalui media sosial. Namun, tidak sedikit juga yang malah kebablasan dalam menyampaikan aspirasinya tanpa memperhatikan etika dan norma dalam berpendapat. Sekali lagi dengan mengatasnamakan kebebasan, membuat pengguna media sosial (*netizen*) sering lupa diri sehingga tidak mengindahkan perkara etika dan moral dalam berkomunikasi melalui media sosial.

Persoalan lainnya yang menyebabkan informasi palsu atau *hoax* menjadi semakin sulit dikendalikan adalah, adanya kebiasaan sebagian besar masyarakat yang ingin cepat berbagi informasi. Masyarakat Indonesia memang memiliki karakteristik *'suka bercerita'* sehingga sifat ini juga terbawa dalam cara mereka berkomunikasi dengan menggunakan media sosial. Sering terjadi bahwa para pengguna media sosial ini membagikan sebuah informasi yang mereka dapatkan tanpa melakukan pengecekan terhadap kebenarannya. Mereka kadang bahkan tidak tau dari mana sumber berita

atau siapa orang yang pertama-tama yang membuat berita tersebut. Banyak yang langsung percaya dan secara tergesa-gesa membagikan berita atau informasi tersebut kepada pengguna lainnya. Pengguna lain yang mendapat informasi ini juga acapkali juga memiliki kecenderungan yang sama dengan pengguna sebelumnya, tanpa menelisik lebih jauh tentang informasi dan berita yang ia terima, langsung membagikan kembali informasi yang didapatnya itu. Demikian terus berlanjut sehingga berita yang sebenarnya belum sempat divalidasi kebenarannya itu malah telah menjadi viral dan dipercaya oleh masyarakat.

Medium komunikasi memiliki pengaruh yang sangat hebat bagi perubahan peradaban manusia sebagai pelaku pengguna media dengan konsep tata ruang yang berbeda tetapi dapat dipertemukan melalui suatu alat yang bernama media sebagai wadah mengkomunikasikan pesan. Di dalam ruang maya, penggunaan medium teknologi juga telah mengubah pola perilaku komunikasi di dalam masyarakat. Meskipun di dalam ruang maya sekalipun, kondisi yang nyata dari suatu sistem kemasyarakatan yang didasari oleh interaksi sosial, stratifikasi sosial, kebudayaan, pranata sosial, kekuasaan tetap berlaku, termasuk juga memungkinkan berlangsungnya suatu sistem kejahatan.

Media sosial memudahkan penggunaannya untuk berbagi informasi. Pada hakekatnya media sosial berfungsi untuk memberikan informasi, memberikan pendidikan berdasarkan makna dan signifikansi data atau informasi, sebagai media untuk berdiskusi dan sebagai fasilitas untuk mengemukakan pendapat. Namun, pada kenyataannya bukan dipergunakan sesuai dengan

fungsinya melainkan acapkali disalahgunakan dengan menyebarkan berbagai isu yang dapat menimbulkan kebencian satu sama lain serta dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dapat kita lihat sendiri saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki *smartphone*, mereka beranggapan bahwa *smartphone* merupakan barang pokok dan wajib dimiliki. Pada awalnya alat komunikasi tersebut dipergunakan dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi, akan tetapi pada kenyataannya melalui alat komunikasi yang menyebarkan berita bohong (*hoax*), masyarakat menjadi mudah tersulut emosi bahkan terpecah belah satu sama lain.

Dengan pengetahuan masyarakat yang masih minim, maka penggiringan opini melalui berita bohong (*hoax*) sangat mudah sekali dilakukan. Faktor utama yang menyebabkan informasi palsu (*hoax*) mudah tersebar di Indonesia adalah karakter masyarakat Indonesia yang dinilai belum terbiasa berpendapat atau berdemokrasi secara sehat. Ancaman global yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia, salah satunya dengan maraknya isu-isu berita *hoax* atau *fake news*, seringkali merupakan berita yang berisi fitnah dan berita bohong yang tersebar luas melalui perantaraan media sosial. Sulit untuk meredam penyebaran berita bohong atau *hoax* yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab tersebut. Setiap individu atau kelompok dapat dengan mudah menyebarkan berita yang tidak benar, dan penerima berita seringkali pula dinilai tidak kritis dalam mencerna pemberitaan apakah berita tersebut benar atau tidak.

D. Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Palsu (*Hoax*) di Media Sosial

Masifnya peredaran informasi palsu (*hoax*) melalui media sosial hendaknya menyadarkan para pengelola media arus utama untuk bekerja lebih profesional dengan standar jurnalistik tinggi. Masyarakat butuh rujukan informasi yang terpercaya dan pada sisi itulah media massa dapat menjawabnya melalui suguhan informasi yang terverifikasi. Media massa harus memperjelas fungsinya sebagai penyaji fakta empiris dan kebenaran.

Fungsi utama kerja media massa adalah membuat masyarakat memiliki informasi yang memadai tentang sebuah peristiwa dan fenomena. Fungsi semacam itu hanya bisa dipenuhi jika media massa terus menyajikan fakta-fakta empiris. Informasi dari media sosial yang belum jelas kadang begitu saja dirujuk dan dikutip media massa arus utama dalam pemberitaan mereka. Berita itu kemudian bergulir menjadi viral dan menjadi lingkaran setan.

Melalui pendekatan kebhinnekaan atau kewargaan (*citizenship education*) dan kewargaan digital (*digital citizenship*) berfokus pada upaya mempersiapkan individu yang melek informasi dan warga yang bertanggung jawab, melalui studi hak, kebebasan, dan tanggung jawab. Upaya ini telah banyak digunakan dalam masyarakat yang rawan konflik kekerasan (Osler dan Starksey, 2005). Salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran tentang hak-hak politik, sosial dan budaya individu dan kelompok, termasuk

kebebasan berbicara dan tanggung jawab dan implikasi sosial yang muncul.

Dalam beberapa kasus, argumentasi yang efektif dan keterampilan yang diperlukan untuk mengartikulasikan keyakinan dan pendapat pribadi secara bermartabat telah dimasukkan sebagai salah satu hasil belajar pada program pendidikan kewarganegaraan. Perhatian pendekatan kebhinnekaan terkait pesan kebencian meliputi pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi pesan kebencian, sehingga memungkinkan individu untuk menangkal pesan kebencian. Salah satu tantangan saat ini adalah mengadaptasi tujuan dan strategi ini ke dunia digital, tidak hanya menyediakan argumen, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan teknologis bahwa setiap warga negara mungkin perlu untuk menetralkan kebencian yang disebarkan melalui berita media online dan media sosial. Sebuah konsep baru kewarganegaraan digital sedang diusulkan oleh beberapa organisasi yang menggabungkan tujuan inti dari literasi media dan informasi, bertujuan untuk mengembangkan ketrampilan teknis dan kritis bagi konsumen dan produsen media, dan yang menghubungkan mereka dengan etika dan hak sipil.

Secara operasional, aspek literasi media ini harus bisa memunculkan kesadaran tentang posisi dan peran media baru (*new media*) dalam kehidupan berbangsa. Warga harus sadar bahwa media ibarat pisau bermata dua, bisa untuk membangun masyarakat atau merusak masyarakat dengan dampak-dampak yang diakibatkannya. Warga harus sadar bahwa mereka berada di ruang publik ketika berselancar di dunia online, sehingga segala

tindakannya tidak bebas nilai. Lebih dari itu, warga juga harus sadar dengan peran strategisnya.

Setiap orang kini adalah wartawan (*citizen journalist*) ketika mereka terlibat dalam aksi mencari, menerima, mengolah, dan menyebarkan informasi. Sebagai wartawan, perhatian pada etika adalah mutlak. Dari sisi kompetensi, literasi media dalam pendidikan kewarganegaraan harus mampu melahirkan kemampuan literasi media yang tinggi ditandai oleh:

- 1) daya kritis dalam menerima dan memaknai pesan,
- 2) kemampuan untuk mencari dan memverifikasi pesan,
- 3) kemampuan untuk menganalisis pesan dalam sebuah diskursus,
- 4) memahami logika penciptaan realitas oleh media,
- 5) kemampuan untuk mengkonstruksi pesan positif dan mendistribusikannya kepada pihak lain.

Di Indonesia, pendekatan kebhinnekaan yang memasukkan aspek literasi media belum menjadi bagian dari kurikulum pembelajaran. Oleh karena itu penting mensosialisasikan pendekatan semacam ini mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Dengan melihat dampak dari minusnya pemahaman media, sehingga meningkatnya pesan kebencian di media sosial, pemerintah nampaknya perlu melakukan revisi isi pendidikan kewarganegaraan dengan memasukkan aspek-aspek yang berkaitan dengan pesan kebencian pada media.

Target literasi media berkebhinnekaan ini terutama diarahkan ke kalangan muda, dengan beberapa pertimbangan. Pertama, secara umum, usia muda adalah fase rawan, di mana mereka belum memiliki konsp diri yang kokoh. Jiwa muda diwakili oleh

semangat yang menggebu dan kecederungan cepat bereaksi pada stimulus dari luar. Kedua, kalangan muda inilah pengguna media baru terbesar. Mereka ini adalah penduduk asli dunia digital (*native digital*) yang akan mewarnai hiruk pikuk dalam dunia online. Bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan dan pemahaman yang cukup tentang media tentu tidak bermasalah. Tetapi bagi mereka yang rentan pemahamannya terhadap media tentu sulit membedakan mana konten media yang bermanfaat, dan mana yang bermasalah jika dikonsumsi masyarakat tertentu. Pada titik itulah literasi media hadir untuk memberdayakan kelompok-kelompok rentan tersebut. Pada lingkup perpaduan antara kehidupan dan pengetahuan tentang literasi media ini melihat bahwa "*seorang yang melek media dapat menginterpretasikan, menganalisis, dan memproduksi pesan melalui media*" (Potter, dalam Eadie, 2009: 562). Hal ini sejalan dengan tujuan literasi media adalah untuk menghasilkan warga masyarakat yang "*well informed*" serta dapat membuat penilaian terhadap content media berdasarkan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap media yang bersangkutan (Eadie, 2009:564). Literasi media mempunyai konsep memfasilitasi khalayak konsumen media (publik) untuk berbudaya dalam memanfaatkan media sosial.

Pentingnya memfasilitasi publik untuk berbudaya dalam memanfaatkan media sosial dapat dicontohkan melalui kasus persebaran informasi palsu (*hoax*), misalnya pada pertengahan tahun 2016 yang lalu publik sempat dihebohkan akibat pemberitaan *hoax* tentang ada 10 juta warga Cina yang akan bermigrasi ke Indonesia. Hal ini tentu perlu diklarifikasi karena ada sentimen rasial yang

dapat mengancam semangat kebhinnekaan, persatuan dan kedamaian di masyarakat dalam pemberitaan ini. Melihat angkanya 10 juta bukanlah jumlah yang sedikit. Membayangkan mereka akan tinggal dan menetap di Indonesia, telah menimbulkan kegaduhan dan polemik berkepanjangan. Berita *hoax* tentang pindahnya 10 juta warga Tiongkok itu disebarluaskan oleh situs-situs gelap seperti Intelijen.co, dengan judul-judul bombastis seperti; *"Jokowi akan Impor 10 Juta Warga Cina, Mau Beranak-pinak di Indonesia?"*

Kutipan yang tersebar melalui media sosial melalui isi berita *hoax* itu antara lain:

"Pernyataan Wakil Perdana Menteri China Liu Yandong, yang menargetkan pertukaran sepuluh juta warga Cina di Indonesia pada 2020 memunculkan kontroversi. Rencana itu bisa dipersepsikan sebagai upaya 'mengimpor' imigran dari Cina ke Indonesia. 10 juta jiwa mau beranak pinak di Indonesia? Menularkan ideologi-ideologinya? Penduduk dituker kayak sandal jepit aja," cuap Zara Zettira lewat akun Twitter @ZaraZettiraZR seperti yang di-copas intelijen.co.²

Kicauan atau Tweet penulis Zara Zettira ZR yang mengancam kerjasama bilateral Indonesia-Cina tersebut dijadikan sumber oleh situs berita online, yang kemudian ditambahkan dengan penekanan kalimat bombastis lainnya, seperti ini;

"10 juta jiwa itu setara dengan jumlah penduduk satu negara Eropa Timur! Transmigrasi antar daerah aja bermasalah apalagi antar negara?" Lalu, *"Waktu kampanye kok ngga dijelasin rencana impor penduduk China?"* kicau @ZaraZettiraZR.³

Informasi menyesatkan tersebut kemudian diolah kembali oleh beberapa situs-situs media dakwah, misalnya dengan judulnya *"5 Tahun Jokowi Memimpin, 30 Juta Cina Masuk Indonesia!"* VOA-Islam menuliskan berita sebagai berikut;

*Indonesia secara demografis (kependudukan) akan mengalami perubahan demografis secara radikal. Komposisi penduduk akan berubah dengan drastis. Jumlah penduduk Cina akan menggeser kaum pribumi. Di kota-kota besar, seperti Medan, Makassar, Kalimantan Barat, Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Surabaya, Cina sudah mulai menggeser penduduk pribumi. Di Jakarta Cina sudah menggeser pribumi dan Betawi. Di Medan kelompok Cina sudah menggeser Melayu. Bahkan, ekonomi Melayu sudah dikangkang Cina. Cina akan memperbudak pribumi dan rakyat Indonesia.*⁴

Sementara itu, dalam berita yang dimuat oleh media dakwah seperti Portal Islam.ga saat ini jumlah etnis Cina adalah 15-20 juta, dan dipastikan akan melesat tajam di tahun 2020. Dengan kejayaan ekonomi dan uang yang berlimpah, etnis Cina tak akan terbendung menjajah suku-suku pribumi yang semakin minoritas;

*"Strategi China benar-benar menerapkan strategi Yahudi menyingkirkan rakyat Pribumi Palestina dan strategi Singapore yang menyingkirkan rakyat melayu. Bagi mereka, era Jokowi adalah anugerah setelah era Gus Dur. Namun kebanyakan umat Islam tersihir, hingga tak sadar akan proyek China-Indonesia ini"*⁵

Seperti yang dikicaikan melalui akun twitter selebriti Zara Zettira, angka 10 juta bukanlah jumlah yang sedikit, dan jumlah itu hampir sama dengan populasi penduduk Jakarta yang diketahui sebagai

² <https://www.intelijen.co.id/jokowi-akan-impor-10-juta-warga-cina-mau-beranak-pinak-di-indonesia/>. Diakses pada 10 September 2016.

³ Ibid.

⁴ <http://www.voa-islam.com/read/intelligent/2015/05/31/37311/5-tahun-jokowi-memimpin-30-juta-cina-masuk-indonesia/#sthash.3mMCOeKU.dpb>. Diakses pada 12 Juni 2015.

⁵ <http://www.portal-islam.ga/2015/05/5-tahun-jokowi-30-juta-china-bermigrasi.html>. Diakses pada 12 Juni 2015.

daerah terpadat di Indonesia. Maka, paling tidak dibutuhkan lahan seluas Jakarta untuk menampung 10 juta warga Tiongkok. Maka, jumlah 10 juta itu menarik untuk dicari tahu asal usulnya. Dari hasil penelusuran, ternyata angka 10 juta itu ditemukan dari suatu pemberitaan lama yang dimuat di situs berita [kabar24.bisnis.com/Bisnis Indonesia](http://kabar24.bisnis.com/Bisnis-Indonesia). Dalam berita yang diberi judul *"RI-China Sepakati Pertukaran 10 Juta" Warga*, yang dimuat dalam laman berita Bisnis.com pada hari Rabu, 27 Mei 2015 menuliskan sebagai berikut;

"Demi mempererat hubungan bilateral, China dan Indonesia menargetkan pertukaran sepuluh juta warganya dalam berbagai bidang pada 2020. Berita itu diturunkan Bisnis.com dari pernyataan Wakil Perdana Menteri China Liu Yandong dalam sambutan pada kuliah umum dengan "Mempererat Pertukaran Antara Masyarakat, Bersama Membina Persahabatan Tiongkok—Indonesia" ⁶

Hasil penelusuran terhadap pemberitaan mengenai 'asal-usul polemik 10 juta warga Cina' itu, ditemui dalam media berita online lainnya yang juga turut meliput acara yang sama, tetapi justru tidak menyebutkan topik mengenai adanya pertukaran warga sebanyak itu. Misalnya, Kompas.com membuat berita dengan judul *"Kepada Wakil PM, Jokowi Minta Tiongkok Tak Sekadar Janji Investasi di Indonesia edisi 27 Mei 2015."* Dalam pemberitaan itu, di laman berita Kompas.com menuliskan:

"Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu Yandong agar para investor asal Tiongkok bisa segera merealisasikan pembangunan di Indonesia. Jokowi ingin agar semua proyek dilaksanakan dengan cepat."Memahas percepatan kerja sama Indonesia-Tiongkok,

terutama sekali kaitannya dengan investasi. Pratikno menuturkan, Liu meresponsnya dengan menyatakan bahwa para pengusaha asal negaranya terbiasa bergerak cepat sehingga keinginan Jokowi akan diimplementasikan dalam waktu dekat, terutama yang terkait dengan proyek infrastruktur. Selain percepatan kerja sama bidang infrastruktur, Liu mengungkapkan pula keinginan negara Tirai Bambu itu untuk bekerja sama lebih luas di bidang pendidikan. Tiongkok menginginkan adanya kerja sama antara universitas di Indonesia dan Tiongkok."⁷

Pada berita lain yang dimuat Liputan6.com dengan judul *"Wakil PM Liu: Kerja Sama China-Indonesia Sejahterakan Dunia"* edisi 27 Mei 2015, juga tidak menjelaskan tentang adanya pertukaran 10 juta warga antara China dan Indonesia. Kutipan di laman berita online Liputan6.com adalah sebagai berikut:

"Wakil Perdana Menteri China Liu Yandong menekankan pentingnya kerjasama antara negeraranya dengan Indonesia. Hal ini diungkapkan Liu saat menyampaikan pidatonya di kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat. Menurut Liu, kerjasama tersebut bukan hanya menguntungkan bagi Indonesia dan China. Tetapi, bermanfaat bagi dunia. "Populasi total Indonesia dan China tercatat 1,6 miliar jiwa yang merupakan 1/4 populasi total seluruh dunia," ucap Liu di kampus UI, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/5/2015). Kerjasama baik antara China dan Indonesia tidak saja membawa kesejahteraan kepada rakyat kedua negara, tetapi juga kontribusi penting bagi Asia, bahkan dunia," sambung dia. Oleh sebab itu, dia berharap kerjasama RI-China tidak hanya terbina dalam satu atau dua bidang. Tetapi bisa terjalin di beberapa sektor. Selain itu, Liu juga mengarisbawahi soal peningkatan kerjasama pendidikan. Hal ini sangat penting, karena kemajuan kerjasama pendidikan adalah faktor utama perkembangan hubungan kedua negara. Dia mengatakan, kemajuan tersebut bisa terwujud dengan adanya langkah nyata yang akan dimulai China dengan penambahan bea siswa bagi pelajar Indonesia yang mau belajar di Negeri Tirai Bambu tersebut. "China akan menambahkan 100 kuota beasiswa pemerintah kepada Indonesia. Atas nama pemerintah China saya juga akan menyumbangkan

⁶<http://kabar24.bisnis.com/read/20150527/19/437942/ri-china-sepakati-pertukaran-10-juta-warga>. Diakses pada 25 September 2016.

⁷<http://nasional.kompas.com/read/2015/05/27/19373091/Kepada.Wakil.PM.Jokowi>. Diakses pada 10 Desember 2016.

(dana pengembangan) kurikulum senilai 500 ribu Yuan," pungkas Liu." ⁸

Ternyata, penelusuran temuan atas angka 10 juta yang terkait dengan hubungan antara Indonesia - Tiongkok itu berasal dari pemberitaan lama mengenai jumlah wisatawan asal Tiongkok yang ditargetkan datang ke Indonesia setiap tahunnya. Sebagaimana yang diberitakan Kompas.com pada Jumat, 27 Maret 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Tiongkok menerapkan kebijakan bebas visa bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan berkunjung ke Negeri Tirai Bambu itu. Berikut adalah kutipannya:

"Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Tiongkok menerapkan kebijakan bebas visa bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan berkunjung ke Negeri Tirai Bambu itu. Menurut Jokowi, tingkat kunjungan WNI ke Tiongkok cukup tinggi. "Jumlah kunjungan wisatawan ke dua negara ditargetkan 10 juta per tahun. Dalam kaitan ini saya minta Pemerintah Tiongkok untuk memberikan bebas visa bagi masyarakat Indonesia yang akan berkunjung ke Tiongkok," kata Presiden Jokowi, saat kunjungan kenegaraan kepada Presiden Xi Jinping di Great Hall of The People Beijing, Kamis (26/3/2015). Presiden meminta hal itu mengingat Indonesia sudah memberikan bebas visa kepada masyarakat Tiongkok yang ingin berkunjung ke Indonesia. Hal itu perlu dilakukan sebagai salah satu wujud konkret kerja sama bilateral dalam memberikan kemudahan masyarakat untuk berkunjung, sehingga pertukaran wisatawan makin tinggi. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan, dalam konteks bilateral, Indonesia-Tiongkok akan melakukan kerja sama pemberantasan korupsi, meningkatkan kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat kedua negara. Dan ini yang penting Indonesia mengharapkan agar beberapa target dalam

hubungan Tiongkok dan Indonesia dapat tercapai dalam tiga agenda, katanya." ⁹

Angka 10 juta pun sebenarnya pernah disebutkan oleh media lainnya yaitu Liputan6.com, yang menuliskan, isi pemberitaan sebagai berikut;

"Karena sudah bebas visa, kita minta kunjungan wisatawan antar Tiongkok dan Indonesia 10 juta per tahun, kata pria yang akrab disapa Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (29/3/2015)." ¹⁰

Jadi jelas bahwa polemik mengenai "angka 10 juta warga Cina" itu bukanlah merupakan 'pertukaran warga RI-Tiongkok' sebagaimana yang secara keliru di media berita online Bisnis.com, dan berita itulah yang kemudian diplintir kesana kemari oleh situs-situs media lainnya. Pembahasan tentang angka tersebut ternyata baru merupakan target jumlah wisatawan Tiongkok yang diharapkan dapat berkunjung ke Indonesia melalui fasilitasi pembebasan visa kunjungan oleh pemerintah RI tersebut.

Permasalahan saat ini, informasi *hoax* telah memecah belah publik. Misalnya, jika dikaitkan dengan momentum Pilkada, publik terbelah menjadi kubu-kubu yang keras. Hal itu diperparah dengan kondisi bahwa sejumlah media massa tertentu juga masing-masing sudah berpihak kepada salah satu pihak dan terpolarisasi sehingga kepercayaan masyarakat pada media mainstream sudah luntur.

⁸ <http://news.liputan6.com/read/2240428/wakil-pm-liu-kerja-sama-china-indonesia-sejahteraan-dunia>. Diakses pada 12 Desember 2016.

⁹ <http://nasional.kompas.com/read/2015/03/27/06413851/Jokowi.Minta.Tiongkok.Terapkan.Bebas.Visa.untuk.WNI>. Diakses pada 12 Desember 2016.

¹⁰ <http://bisnis.liputan6.com/read/2199154/bebaskan-visa-jokowi-bidik-10-juta-turis-tiongkok-kunjungi-ri>. Diakses pada 12 Desember 2016.

Di dalam media sosial bahkan gerakan untuk memulai literasi media dilakukan melalui pernyataan suatu 'adagium' (pepatah) yakni, "Jika jempolmu sudah kepingin banget share, tunggu dulu."

Sejumlah kalangan beranggapan *hoax* akan berkurang setelah momen Pilpres (Pemilihan Presiden) digelar. Namun, tak ada yang bisa menjamin hal tersebut akan terjadi, peningkatan literasi dalam menghadapi era digital menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Lebih lanjut untuk membahas tentang literasi media berkebhinnekaan dengan tema pemberitaan tentang tenaga kerja asing China, kajian menggunakan instrumen model Empowering 8 dengan pendekatan pemecahan masalah untuk resource-based learning.

Menurut Wijetunge dan Alahakoon (2009) melalui model *Empowering 8* (E8) ini, kemampuan melakukan literasi informasi dengan penelusuran suatu berita *hoax* dilakukan melalui 8 tahapan praktik untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi topik/subyek, sasaran audiens, format yang relevan, jenis-jenis sumber.
- 2) Eksplorasi sumber dan informasi yang sesuai dengan topik
- 3) Seleksi dan merekam informasi yang relevan, dan mengumpulkan kutipan-kutipan yang sesuai.
- 4) Organisasi, evaluasi dan menyusun informasi menurut susunan yang logis, membedakan antara fakta dan pendapat, dan menggunakan alat bantu visual untuk

membandingkan dan mengkontraskan informasi

- 5) Penciptaan informasi dengan menggunakan kata-kata sendiri, edit, dan pembuatan daftar pustaka.
- 6) Presentasi, penyebaran atau display informasi yang dihasilkan dapat menunjukkan perbandingan dari kedua kelompok pemberitaan sehingga dinilai keakurasiannya.
- 7) Penilaian output, berdasarkan masukan dari Penilaian output, berdasarkan masukan dari orang lain.
- 8) Penerapan masukan, penilaian, pengalaman yang diperoleh untuk kegiatan yang akan datang; dan penggunaan pengetahuan baru yang diperoleh untuk pelbagai situasi.

Berikut ini yang disajikan dalam tabel-tabel adalah suatu contoh dalam mengembangkan model literasi media berdasarkan tahapan dalam model Empowering Eight (E8) dengan menggunakan contoh topik polemik berita "Masuknya 10 juta tenaga kerja asing Cina ."

Identifikasi dan Eksplorasi Sumber Berita (Tahapan 1 dan 2)	
1	<p><i>Twitter/Berita Online: Yusril Ihza Mahendra (YIM) (@Yusrilihza_Mhd, 1,14 juta pengikut). YIM pernah bikin serial kicauan soal imigran gelap yang masuk Indonesia (15 Juli 2016). "Indonesia akan dibanjiri pekerja China yang merampas kesempatan kerja rakyat kita sendiri," Dia mengungkapkan, pekerja asal China yang datang ke Indonesia diprediksi mencapai 10 juta jiwa. Masalah lainnya, pembebasan visa tersebut banyak diberikan juga kepada negara-negara yang tergolong miskin dan tidak stabil. Penduduknya cenderung ingin meninggalkan negaranya karena alasan politik dan ekonomi. "Pemerintah tidak memperhitungkan dampak sosial dan politiknya bagi negara kita. Pekerja China yang konon akan datang sampai 10 juta itu jelas tidak mudah untuk dikontrol. Sebagian besar mereka pasti takkan kembali ke China."</i></p> <p>http://politik.rmol.co/read/2016/07/15/253266/Yusril:-Indonesia-Akan-Dibanjiri-Pekerja-Asal-China-</p>
2	<p><i>Facebook: Jonru Ginting (JG) menambahkan foto baru ke album: Artikel Copy Paste. 15 Juli 2016 · "10 JUTA PEKERJA CHINA & ANCAMAN KEDAULATAN NEGARA" by @Yusrilihza_Mhd</i></p>
3	<p><i>Facebook: PosMetro.co edisi tanggal 12 Oktober 2016 dengan judul "Ssst banyak Tenaga Kerja Asing China Berseliweran di KuKar, diduga Tenaga Kerja Asing Ilegal".</i></p>
4	<p><i>Facebook: LingkaranNews, 22 Juli 2016 dengan judul "Bahayanya Tenaga Kerja Asing China, adalah Mereka dibekali Pengetahuan Intelejen".</i></p>
5	<p><i>Facebook: Liputan77.com, tanpa tanggal dengan judul "Wajib dibaca Waspada Migrasi Massal 10 Juta Warga Negara China Masuk Indonesia. Sedangkan satu orang saja dapat Menggusur Pribumi se-DKI, Apalagi 10 Juta, Bagaimana Nasib Anak Cucu Kita Nanti, Bantu Share".</i></p>
6	<p><i>Facebook: Eramuslim.com, 23 Juli 2016. Dengan judul "Waspada Tenaga Kerja Cina Banyak Perawakannya Mirip Tentara dan Dibekali Pengetahuan Intelejen"</i></p>
7	<p><i>Berita Online: kabar2..bisnis.com dengan judul RI-China Sepakati Pertukaran 10 Juta Warga edisi 27 Mei / 2015 21:29 WIB</i></p> <p><i>Demi mempererat hubungan bilateral, China dan Indonesia menargetkan pertukaran sepuluh juta warganya dalam berbagai bidang pada 2020. Wakil Perdana Menteri China Liu Yandong mengatakan hal tersebut termasuk dalam mekanisme kerja sama yang hendak dibentuk oleh kedua pemimpin negara. "Tiga mekanisme akan memimpin kerja sama di bidang keamanan politik, ekonomi dan perdagangan, serta humaniora," katanya dalam sambutan di Kampus Universitas Indonesia, Rabu (27/5/2015).</i></p> <p>http://kabar24.bisnis.com/read/20150527/19/437942/ri-china-sepakati-pertukaran-10-juta-warga</p>

Tabel 01. Tahapan Identifikasi dan Eksplorasi Sumber Berita yang Tersebar melalui Media Sosial Facebook dan Twitter (Sumber data: Olah data primer)

Seleksi dan Rekaman Informasi (Tahapan 3)	
1	<p><i>Isu 10 juta buruh China di Indonesia 'plintiran' media abal-abal</i>, sumber : Merdeka.com edisi Kamis, 29 Desember 2016 17:03</p> <p>Sumber, https://www.merdeka.com/peristiwa/isu-10-juta-buruh-china-di-indonesia-plintiran-media-abal-abal.html.</p>
2	<p><i>Serbuan 10 Juta TKA Asal Cina, Menkumham: Itu Hoax!</i> Sumber republiko.co.id edisi Kamis , 29 Desember 2016, 12:12 WIB</p> <p><i>Selain itu, Yasona mengungkap, jumlah 21 ribu TKA Cina yang ada di Indonesia masih relevan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Pengawasan berkaitan penyalahgunaan visa masuk WNA ke Indonesia. "Kalau ada yang salah gunakan masuk sebagai turis, datanya pasti ada di kami, paspor nomor sekian catatannya misal 30 hari, lalu lebih, berarti data kita overstay, tinggal kita cari ini barang," kata dia.</i></p> <p>Sumber, http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/29/oixl41361-serbuan-10-juta-tka-asal-cina-menkumham-itu-hoax</p>
3	<p>Pemberitaan dengan judul "<i>BKPM Tepis Serbuan 10 juta Tenaga Kerja dari China</i>", sumber kontan.co.id edisi Kamis, 29 Desember 2016</p> <p><i>Dari data realisasi investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dimiliki oleh BKPM, jumlah TKA China baru yang diserap periode Januari-September 2016 tercatat 3.718 tenaga kerja atau 0,3% dari total penyerapan 975.898 tenaga kerja/lapangan pekerjaan baru. Peningkatan yang signifikan tersebut menjadi pemicu meningkatnya penggunaan TKA oleh investor China. Realisasi investasi China melonjak dari tahun 2014 berada di peringkat 8, kini di periode Januari-September 2016 mencapai US\$ 1,6 miliar berada di peringkat tiga.</i></p> <p>Sumber, http://m.kontan.co.id/news/bkpm-tepis-serbuan-10-juta-tenaga-kerja-dari-china</p>

Tabel 02. Tahapan seleksi dan rekaman informasi (Sumber data: Olah data primer)

Evaluasi Informasi (Tahapan 4)	
1	<p>Pemerintah Tepis Isu 10 Juta Tenaga Kerja China Masuk Indonesia sumber : news.detik.com edisi Selasa 20 Desember 2016, 18:34 WIB Kementerian Sekretariat Negara mengklarifikasi isu masuknya 10 juta tenaga kerja asing asal China ke Indonesia yang dimuat dalam akun Twitter resmi Kemensetneg, @KemensetnegRI.</p> <p><i>"Jadi bohong besar jika akan ada 10 juta pekerja asing asal Tiongkok yang masuk Indonesia. Kemungkinan angka itu diolah dari target kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman)," Menurut data tersebut jumlah wisman asal Greater China (China, Hongkong, Macau dan Taiwan) yang ingin dicapai oleh pemerintah pada 2016 ialah 2,1 juta dan hingga 2019, nanti jumlah wisman asal Greater China yang ditargetkan berjumlah 3,3 juta orang. Jumlah tenaga kerja asing yang ada di Indonesia pada 2016 ialah 74.183 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 21.271 tenaga kerja asal China yang menempati urutan pertama jumlah tenaga kerja asing di Indonesia. Kemudian disusul Jepang dengan jumlah 12.490 tenaga kerja.</i></p> <p>Sumber https://news.detik.com/berita/d-3376443/pemerintah-tepis-isu-10-juta-tenaga-kerja-china-masuk-indonesia.</p>

2	<p>Pemberitaan dengan judul <i>"Rumor Eksodus 10 Juta Warga China ke Indonesia? Inilah Penjelasan Presiden"</i>, sumber www.solopos.com edisi Minggu, 27 November 2016</p> <p><i>"Haduh, yang Tiongkok itu turis. Yang saya tanda tangan itu turis, saya cek yang tenaga kerja dari Tiongkok itu 14.000 orang. Ini jangan dipeleket-plesetkanlah. Mentang-mentang media online kita ini tidak kita atur mengenai isu-isu, semuanya dimasukkan dengan dipeleket-plesetkan seperti itu," kata Presiden Jokowi melalui siaran tertulis, Sabtu (26/11/2016). Presiden menjelaskan, pemerintah menggenjot habis-habisan agar pada 2019 jumlah turis yang masuk ke Indonesia melonjak dari 9 juta menjadi 20 juta. Untuk itu, Kepala Negara menyampaikan Pemerintah habis-habisan dan dengan segala cara memperbaiki posisi Indonesia, baik dengan mendiferensiasi produk-produk yang ada, membangun brand setiap destinasi, maupun promosi besar-besaran. Untuk itulah, lanjut Presiden, dirinya sudah menandatangani kesepakatan dengan Presiden China Xi Jinping karena per tahun 150 juta turis Negeri Panda melancong ke luar negeri. Sayangnya, jumlah besar itu selama ini lebih banyak diserap oleh Amerika Serikat dan Eropa.</i></p> <p>Sumber http://www.solopos.com/2016/11/27/rumor-eksodus-10-juta-warga-china-ke-indonesia-inilah-penjelasan-presiden-77212</p>
3	<p>Pemberitaan dengan judul <i>Dirjen Imigrasi Ungkap Data WN China yang Keluar Masuk Indonesia</i> sumber Kompas.com edisi tanggal- 24/12/2016</p> <p><i>Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, tidak semua warga negara asing (WNA) bisa masuk ke Indonesia. "Hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan keamanan serta kedaulatan yang kami terima," Ronny menuturkan, berdasarkan perlintasan yang tersebar dari 125 kantor imigrasi dan 131 tempat pemeriksaan imigrasi di Indonesia dari jumlah 8,9 juta perlintasan, WN China yang datang ke Indonesia sebanyak 1.401.443 dan yang keluar dari Indonesia sebanyak 1.452.249 orang. "Jumlah yang keluar lebih banyak dari yang masuk. Namun belum dibedakan apakah mereka bekerja atau wisata," Ronny menampik adanya "serbuan" tenaga kerja asing (TKA) dari China ke Indonesia. Sumber http://nasional.kompas.com/read/2016/12/24/14435601/dirjen.imigrasi.ungkap.data.wn.china.yang.keluar-masuk.indonesia</i></p>

Tabel 03. Tahapan Evaluasi Informasi (Sumber: Olah data primer)

Berdasarkan identifikasi, eksplorasi, seleksi dan evaluasi berita, maka tahapan berikutnya (tahapan ke 5) adalah menyusun rangkaian informasi baru. Berdasarkan studi kasus mengenai "Masuknya 10 juta tenaga kerja asing Cina" maka informasi baru yang bisa disusun adalah sebagai berikut :

Berita tentang 10 juta tenaga kerja asing cina yang akan masuk ke Indonesia adalah plintiran dari harapan Presiden Jokowi agar sampai tahun 2019 wisatawan dari China bisa mencapai 10 juta orang sehingga dapat menambah devisa negara dari sektor pariwisata. Jumlah tenaga kerja asing terbesar memang berasal dari China namun jumlahnya sampai tahun 2016 sebanyak 21.271 orang

Setelah mengidentifikasi informasi baru, penting untuk melanjutkan tahapan berikutnya (tahapan 6) dengan membuat pemetaan mengenai sumber berita untuk mengetahui 'kebenaran atas informasi baru yang disusun itu.

Klarifikasi dan Perbandingan Sumber Berita (Tahapan 6)	
PosMetro, Lingkar News, Era Muslim, Berita 24, VOA Islam, Intelijen	Republika, Merdeka, Detik, Kompas, Solo Pos
<p>Dari perbandingan 2 kelompok besar media yang menjadi sumber berita, yang pertama kelompok yang sumber berita media yang sepihak, tidak menggunakan kaidah jurnalistik, sedangkan kelompok kedua sumber berita media yang berbadan hukum jelas, Punya kredibilitas, menggunakan cover both sides dalam menyajikan berita, format berita sesuai kaidah jurnalistik</p>	
<i>Narasumber</i>	
-	Kepala BKPM, Dirjen Imigrasi, Mensesneg, Menkumham, Presiden Joko widodo, Menkopolhukam, Panglima TNI, Kapolri
<p>Dari perbandingan 2 kelompok besar media dalam memilih narasumber untuk memperkuat berita terlihat kelompok pertama tidak menggunakan narasumber yang jelas, ulasannya banyak menggunakan asumsi tanpa konfirmasi sehingga dikhawatirkan bias, sedangkan kelompok kedua narasumber merupakan orang yang berkompeten dengan masalah yang dibahas sehingga kredibilitas dan tingkat akurasi tinggi</p>	
<i>Data yang disajikan</i>	
<p>Jumlah tenaga kerja asing Cina 10 juta</p> <p>Ada kesepakatan tukar menukar dengan cina Wakil Perdana Menteri China Liu Yandong</p>	<p>Terdapat 21.271 tenaga kerja asal China memang menempati urutan pertama jumlah tenaga kerja asing di Indonesia.</p> <p>Presiden, dirinya sudah menandatangani kesepakatan dengan Presiden China Xi Jinping karena per tahun 150 juta turis Negeri Panda melancong ke luar negeri. berdasarkan data perlintasan yang tersebar dari 125 kantor imigrasi dan 131 tempat pemeriksaan imigrasi di Indonesia dari jumlah 8,9 juta perlintasan, WN China yang datang ke Indonesia sebanyak 1.401.443 dan yang keluar dari Indonesia sebanyak 1.452.249 orang.</p>
<p><i>Dari perbandingan pemberitaan berdasarkan pengelompokan ini terlihat bahwa kelompok pertama tidak menguraikan rincin data dan sumber data, sedangkan kelompok kedua dapat dengan rinci dan jelas sumber data dengan data statistik menurut waktu tertentu sehingga dapat dengan jelas menggambarkan kondisi riil</i></p>	

Tabel 04. Tahapan Mengklarifikasi dan Perbandingan Sumber Berita

Penilaian output (yang merupakan tahapan ke 7) menjadi suatu langkah penting dalam membahas hasil framing literasi media, misalnya dengan membandingkan pendapat para pakar atau ahli. Dalam isu tentang 10 juta buruh Cina di Indonesia yang 'diplintir' media abal-abal, media online seperti Merdeka.com (edisi Kamis, 29 Desember 2016) menampilkan pernyataan pengamat media dan politik Ignatius Haryanto yang menilai berita hoax yang menyebarkan isu masuknya 10 juta buruh Cina telah sengaja diplintir (dimanipulasi) oleh media-media massa tertentu dan tersebar melalui postingan di media sosial. Padahal, muatan berita yang sebenarnya adalah mengenai target Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan (turis) dari Cina ke Indonesia hingga sejumlah 10 juta orang hingga tahun 2019. Pandangan pakar yang dimuat di dalam laman berita online Merdeka.com, dikutip sebagai berikut:

*"Muncul isu soal kedatangan 10 juta pekerja asal China. Ternyata itu adalah pelintiran dari target Kementerian Pariwisata terhadap wisatawan asal China, sejumlah 10 juta orang," kata Ignatius di LBH Jakarta, Kamis (29/12) Untuk masalah ini, dia melihat wartawan sering menggunakan narasumber tidak kredibel dan cenderung spekulatif tanpa data yang valid, termasuk soal isu kedatangan buruh asing asal China. Narasumber tidak kredibel. Narasumber yang spekulatif (berandai-andai) tapi tidak berbasis fakta atau data, jelasnya. Wartawan atau penulis tidak kritis soal data tidak cek dan ricek soal data yang 'too good to be true'. Bayangkan berapa realitas fisik dari kehadiran 10 juta orang jumlah penduduk DKI Jakarta atau dua kali lipat jumlah penduduk Singapura, jelasnya."*¹¹

Dalam langkah berikutnya (tahapan 8), perlu untuk terus memperbaharui informasi dan mengikuti perkembangan pewacanaan atas pemberitaan yang menjadi polemik dan sumber berita hoax. Meskipun pemberitaan di media online mengenai polemik atas 'serbuan 10 juta warga Cina' telah diperbaharui untuk menangkal persebaran berita hoax melalui media sosial, ternyata perkembangan wacana mengenai hal tersebut tetap berlangsung bahkan berkembang menjadi wacana baru, misalnya tentang 'serbuan Tenaga Kerja Asing Cina dan ancaman Komunisme'. Sebagaimana yang dilansir oleh pemberitaan di media online Republika.co.id yang menurunkan tajuk "*Soal Serbuan TKA Cina dan Ancaman Komunis, Ini Kata Panglima TNI*" dalam laman berita Republika.co.id edisi Rabu, 28 Desember 2016. Kutipan pemberitaannya adalah sebagai berikut ini:

"Panglima TNI mengingatkan berbagai ancaman keamanan dari luar dan dalam negeri yang terus mengintai Indonesia. Terkait isu masuknya TKA asal Cina dan bangkitnya komunisme, Jendral Gatot menegaskan informasi itu dibuat untuk mengaburkan permasalahan utama bangsa Indonesia. Pemerintah telah mengonfirmasi terkait informasi ini. Dan kalau yang namanya Komunis, TNI sudah paham dan tanpa perlu dikomando akan mengantisipasi hal itu, kata Panglima TNI. Gatot menilai memang informasi yang berkembang sengaja dibelok-belokkan agar publik beralih pada isu ini, dan abai pada masalah serta ancaman utama bangsa Indonesia. Ia berkaca pada kasus Suriah yang kini porak poranda karena masyarakatnya terbelah akibat tujuan politik, berujung pada konflik sektarian. Panglima TNI menegaskan ancaman utama Indonesia kini adalah kekuatan luar yang tidak ingin bangsa ini menjadi bangsa besar dan berjaya. Diantaranya kekuatan geopolitik antara negara-negara persemakmuran di Asia Tenggara dan Australia, Sengketa Laut Cina Selatan dan Terorisme

¹¹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/isu-10-juta-buruh-china-di-indonesia-plintiran-media-abal-abal.html>. Diakses pada 30 Desember 2016.

global. Banyak pihak tidak sadar bahwa pihak luar sudah bermain. Karena itu bagaimana cara mengatasinya. Tidak ada cara lain, Bhinneka Tunggal Ika adalah kunci pemersatu bangsa. Elemen bangsa yang bersatu. "Kalau tidak ada Islam, bukan Indonesia. Kalau tidak ada Kristen bukan Indonesia. Kalau tidak ada Hindu bukan Indonesia. Kalau tidak ada Budha dan Konghucu bukan Indonesia. Karena itulah perlu bersama merawat Indonesia. Jadi Indonesia milik kita bersama, tegasnya." ¹²

Pewacanaan mengenai ancaman atas orang asing (Cina) justru berkembang menjadi polemik baru sehingga memunculkan polemik merupakan sumber pemberitaan baru oleh media lainnya. Hal ini misalnya diliput dalam pemberitaan media online tribunnews.com yang bertajuk "*Kapolri: Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di China Justru Jauh Lebih Banyak*", sebagaimana yang dimuat pada edisi Jumat, 30 Desember 2016. Liputan tersebut kutipan konten (isi) nya adalah sebagai berikut:

"Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta masyarakat tidak membesar-besarkan isu serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya dari China yang hanya berjumlah 21.000 orang. Menurut dia, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Cina justru jauh lebih banyak. Di China TKI kita lebih dari 21.000, jumlahnya 50.000 lebih, di Hongkong bahkan mencapai lebih dari 200.000. Di Malaysia kata Tito, bahkan TKI lebih mendominasi dari tenaga kerja asing lainnya. Tapi di Malaysia, banyaknya TKI tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan politik, justru membantu menggerakkan perekonomian, kata dia. Dia menyebutkan, di tengah goncangan ekonomi global, investasi dari China justru mengucur ke mana-mana termasuk Amerika Serikat. Wajar jika Indonesia juga berharap investasi juga dari China," ¹³

¹²<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/28/oiw8vj354-soal-serbuan-tka-cina-dan-ancaman-komunis-ini-kata-panglima-tni>. Diakses pada 15 Januari 2017.

Polemik itu terus berkembang dan isu mengenai hoax pun akhirnya juga dimunculkan oleh media. Hal ini misalnya muncul dalam tajuk berita "*Usai Rakor, Wiranto Pastikan Informasi 10 Juta TKA China Ilegal Hoax*" sebagaimana yang dimuat dalam pemberitaan Rmol.co edisi Jumat, 06 Januari 2017, yang isi beritanya dikutip sebagai berikut:

"Informasi mengenai tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal China dengan jumlah jutaan adalah tidak benar. Kepastian itu sebagaimana ditegaskan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) Wiranto. Harus kita bedakan antara isu atau hoax dengan realitas. Ternyata setelah kita kumpulkan para menteri dan lembaga terkait, kita pastikan bahwa ketakutan kita akan adanya upaya sistematis dan terencana mengenai datangnya TKA dari China secara terstruktur itu tidak benar, pungkash Wiranto. Dalam kesempatan ini, Wiranto mengklaim bahwa TKA ilegal yang datang ke Indonesia dengan menggunakan visa turis telah monitoring dan diamankan oleh penegak hukum. Kemudian dari sisi langkah upaya kita untuk terus memonitor mereka-mereka yang nyata-nyata menggunakan dalih turis kemudian kerja dan sudah ditangkap dan sebagainya, sambungnya. Wiranto juga memastikan bahwa jumlah TKA ilegal tidak sebanyak yang dikabarkan di media sosial, yaitu sebanyak 10 juta. Itu memang menunjukkan bahwa jumlahnya belum seperti yang dibicarakan ya sampai puluhan juta dan sebagainya, tegas Wiranto."

¹⁴

Dengan demikian, jelas bahwa polemik pewacanaan tentang 'serbuan orang Cina' merupakan suatu desain yang dirancang juga direproduksi melalui pemberitaan media online yang merupakan media mainstream dan muatannya tersebar luas di media sosial. Oleh karena itu, di dalam merespon

¹³<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/12/30/kapolri-tenaga-kerja-indonesia-tki-di-china-justru-jauh-lebih-banyak>. Diakses pada 15 Januari 2017.

¹⁴<http://politik.rmol.co/read/2017/01/06/275302/Usai-Rakor,-Wiranto-Pastikan-Informasi-10-Juta-TKA-China-Ilegal-Hoax>. Diakses pada 15 Januari 2017.

perkembangan pemberitaan yang informasi awalnya telah 'dipintir' (dimanipulasi) sehingga menjadi informasi palsu (*hoax*) upaya mengembangkan model literasi media sebagaimana yang dipraktikkan melalui model *Empowering Eight* (E8) ini merupakan langkah untuk mengidentifikasi, menelusuri, memverifikasikan sumber-sumber informasi. Hal ini penting mengingat masih banyak pengguna internet dan media sosial yang masih terpolarisasikan oleh pemberitaan informasi palsu (*hoax*) khususnya di media sosial. Pembiaran atas keadaan ini bisa menimbulkan adanya konflik baik dalam ranah privat maupun publik. Masyarakat perlu dibekali oleh kemampuan literasi dan edukasi agar bisa menyaring berbagai informasi dari media sosial.

E. Kesimpulan dan Saran

Ujaran kebencian kian meningkat jumlahnya di ranah online. Bagi masyarakat Indonesia yang plural dampak atas persebaran *hoax* dan ujaran kebencian sungguh menguatirkan. Dengan menggunakan model literasi media sebagaimana yang dikaji dalam studi ini, kita dapat menilai akurasi dari suatu berita apakah itu palsu (*hoax*) atau tidak dengan membandingkan dengan berbagai sumber berita lainnya. Kasus-kasus yang sudah terjadi sebagai akibat dari menyebarnya *hoax* dan ujaran kebencian seharusnya dapat menjadi pelajaran berharga. Jalan yang ditempuh dalam mengatasi persebaran *hoax* dan ujaran kebencian misalnya dilakukan oleh pemerintah dengan pendekatan struktural melalui regulasi. Selain itu, upaya kultural melalui

peningkatan kemampuan literasi media menjadi suatu kebutuhan relevan untuk segera dilakukan dalam rangka mengembangkan keberdayaan netizen dalam merespon merebaknya pesan-pesan kebencian di ranah online terutama melalui media sosial. Netizen yang memiliki kemampuan literasi media cukup tinggi, tak hanya sadar pada etika berkomunikasi saja tetapi juga memiliki keterampilan konstruktif dalam menerima, memproduksi dan membagikan muatan informasi (berita). Melalui model literasi dan edukasi yang dikembangkan ini, informasi dari berbagai peristiwa di belahan bumi mana pun dengan dinamika seperti apa pun tidak lagi ditelan mentah-mentah, melainkan dapat melalui penyaringan atau *filter*. Penyikapan secara bijaksana atas berbagai informasi yang beredar, pentingnya kesadaran atas pemanfaatan media sosial yang bisa menghadirkan rasa damai, rasa aman, serta keselamatan di tengah-tengah masyarakat menjadi suatu pesan moral yang penting dalam mengembangkan literasi media bagi publik di Indonesia yang masyarakatnya beragam. Masyarakat sebaiknya menyelidiki benar atau tidak informasi yang akan dibagikannya. Jika tidak benar, apalagi memuat fitnah, hingga anjuran kekerasan, maka informasi itu tak perlu disebar. Kalau sumber tidak jelas, tidak terverifikasi, tidak masuk akal dan tidak bermanfaat, maka tidak usah disebar. Di sisi lain, media massa mainstream termasuk media berita online, diharapkan tetap mengedepankan kompetensi dan independensi, sekalipun media tersebut berafiliasi dengan kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Media boleh saja diperjualbelikan, pemilik silih berganti, tetapi *news room* harus dipimpin orang yang kompeten dan bermoral dalam mengabdikan kepada

publik luas. Gerakan literasi media menawarkan solusi dalam rangka menghadapi perkembangan *new media* termasuk media sosial agar terbentuk keseimbangan terutama dalam memelihara harmoni di dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Anninditya Annisa. 2012. "Etika dan Prinsip Jurnalisme Media Siber Detikcom Mengenai Mekanisme Pemberitaan Tewasnya WNI di Kerusuhan Mesir". *e-Jurnal Mahasiswa Universitas Padjajaran* Vol 1 No. 1

Aufderheide, Patricia. 1992. *Media Literacy. A Report of the National Leadership Conference on Media Literacy*. Queenstown Maryland: The Aspen Institute Wye Center.

Bogdan dan Taylor (1975) dalam J. Moleong, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian. Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.

Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Iriantara, Yosol. 2009. *Literasi Media: Apa, Mengapa, Bagaimana*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Potter, W James dalam Eadie, F. William. (Ed). 2009. *21st Century Communication A Reference Handbook, Volume 2*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.

Marfuah Sri Sanityastuti. 2014. "Literasi Media: Upaya Menyikapi Tayangan Televisi." *Jurnal Komunikasi Profetik* Vol. 7, No. 2.

Osler, Starkey. 2005. *Changing Citizenship 1st Edition*. London: Open University Press

Sulistyo Basuki. 2013. "Literasi Informasi dan Literasi Digital". Artikel Blog dalam <https://sulistyobasuki.wordpress.com/2013/03/25/literasi-informasi-dan-literasi-digital/>. Diakses pada 8 Mei 2016.

Wijetunge, P, dan Alahakoon, U. 2009. "Empowering 8: The Information Literacy Model Developed in Sri Lanka to Underpin Changing Education Paradigms of Sri Lanka." *Sri Lankan Journal of Librarianship and Information Management* 1(1): 31-41. DOI: <http://doi.org/10.4038/sllim.v1i1.430>. Diakses pada 23 Februari 2016.

Sumber-sumber pemberitaan online:

INTELIJEN | Jokowi akan Impor 10 Juta Warga Cina, Mau Beranak. 2015. <https://www.intelijen.co.id/jokowi-akan-impor-10-juta-warga-cina-mau-beranak-pinak-di-indonesia/>. Diakses pada 10 September 2016.

5 Tahun Jokowi Memimpin, 30 Juta Cina Masuk Indonesia! - VOA Islam. 2015. <http://www.voa-islam.com/read/intelligent/2015/05/31/37311/5-tahun-jokowi-memimpin-30-juta-cina-masuk-indonesia/#sthash.3mMCOeKU.dpb>. Diakses pada 12 Juni 2015.

5 Tahun Jokowi, 30 Juta China Bermigrasi | PORTAL ISLAM.2015.<http://www.portal-islam.ga/2015/05/5-tahun-jokowi-30-juta-china-bermigrasi.html>. Diakses pada 12 Juni 2015.

RI-China Sepakati Pertukaran 10 Juta Warga - Kabar24 - Bisnis.com. 2015. <http://kabar24.bisnis.com/read/20150527/19/437942/ri-china-sepakati-pertukaran-10-juta-warga>. Diakses pada 25 September 2016.

Kepada Wakil PM, Jokowi Minta Tiongkok Tak ... - Nasional Kompas. 2015. <http://nasional.kompas.com/read/2015/05/27/19373091/Kepada.Wakil.PM.Jokowi>. Diakses pada 10 Desember 2016.

Wakil PM Liu: Kerja Sama China-Indonesia Sejahterakan Dunia ...2015. <http://news.liputan6.com/read/2240428/wakil-pm-liu-kerja-sama-china-indonesia-sejahterakan-dunia>. Diakses pada 12 Desember 2016.

Jokowi Minta Tiongkok Terapkan Bebas Visa untuk WNI - Kompas.com.2015. <http://nasional.kompas.com/read/2015/03/27/06413851/Jokowi.Minta.Tiongkok.Terapkan.Bebas.Visa.untuk.WNI>. Diakses pada 12 Desember 2016.

Bebaskan Visa, Jokowi Bidik 10 Juta Turis Tiongkok Kunjungi RI ...2015. <http://bisnis.liputan6.com/read/2199154/bebaskan-visa-jokowi-bidik-10-juta-turis-tiongkok-kunjungi-ri>. Diakses pada 12 Desember 2016.

Isu 10 juta buruh China di Indonesia 'plintiran' media abal-abal ...2016. <https://www.merdeka.com/peristiwa/isu-10-juta-buruh-china-di-indonesia-plintiran->

- media-abal-abal.html. Diakses pada 30 Desember 2016.
- Soal Serbuan TKA Cina dan Ancaman Komunis, Ini Kata Panglima TNI. 2016. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/28/oiw8vj354-soal-serbuan-tka-cina-dan-ancaman-komis-ini-kata-panglima-tni>. Diakses pada 15 Januari 2017
- Kapolri: Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di China Justru Jauh Lebih. 2016. <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/12/30/kapolri-tenaga-kerja-indonesia-tki-di-china-justru-jauh-lebih-banyak>. Diakses pada 15 Januari 2017.
- Usai Rakor, Wiranto Pastikan Informasi 10 Juta ... - Politik - RMOL.co. 2017. <http://politik.rmol.co/read/2017/01/06/275302/Usai-Rakor,-Wiranto-Pastikan-Informasi-10-Juta-TKA-China-Illegal-Hoax>. Diakses pada 15 Januari 2017.
- Yusril: Indonesia Akan Dibanjiri Pekerja Asal China - Politik - RMOL.co. 2016. <http://politik.rmol.co/read/2016/07/15/253266/Yusril:-Indonesia-Akan-Dibanjiri-Pekerja-Asal-China>. Diakses pada 10 September 2016.
- Serbuan 10 Juta TKA Asal Cina, Menkumham: Itu Hoax! | Republika. 2016. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/29/oixl41361-serbuan-10-juta-tka-asal-cina-menkumham-itu-hoax>. Diakses pada 30 Desember 2016.
- BKPM tepis serbuan 10 juta tenaga kerja dari China - Kontan Online.2016. <http://m.kontan.co.id/news/bkpm-tepis-serbuan-10-juta-tenaga-kerja-dari-china>. Diakses pada 30 Desember 2016.
- Sumber Laman Berita Media Sosial:**
- Jonru Ginting (JG) menambahkan foto baru ke album: Artikel Copy Paste. 15 Juli 2016 • "10 JUTA PEKERJA CHINA & ANCAMAN KEDAULATAN NEGARA" by @Yusrilihza_Mhd <https://www.facebook.com/jonru.page/posts/10154450036934729:0>. Diakses pada 17 Juli 2017.
- PosMetro edisi tanggal 12 Oktober 2016 dengan judul "Ssst banyak Tenaga Kerja Asing China Berseliweran di KuKar, diduga Tenaga Kerja Asing Ilegal". https://www.facebook.com/pg/posmetroinfo/posts/?ref=page_internal. Diakses pada 20 Oktober 2017.
- LingkarNews, 22 Juli 2016 dengan judul "Bahayanya Tenaga Kerja Asing China, adalah Mereka dibekali Pengetahuan Intelejen". <https://www.facebook.com/LingkarNews-297275637282497/>. Diakses pada 28 Juli 2016.
- Liputan77.com, tanpa tanggal dengan judul "Wajib dibaca Waspada Migrasi Massal 10 Juta Warga Negara China Masuk Indonesia. Sedangkan satu orang saja dapat Menggusur Pribumi se-DKI, Apalagi 10 Juta, Bagaimana Nasib Anak Cucu Kita Nanti, Bantu Share". <https://www.facebook.com/liputan77dotcom/>. Diakses pada 28 Juli 2016.
- Eramuslim.com, 23 Juli 2016. Dengan judul "Waspada Tenaga Kerja Cina Banyak Perawakannya Mirip Tentara dan Dibekali Pengetahuan Intelejen" <https://www.facebook.com/Eramuslimcom-303421579867766/>. Diakses pada 28 Juli 2016.
- Yusril Ihza Mahendra (YIM) (@Yusrilihza_Mhd, 1,14 juta pengikut). YIM pernah bikin serial kicauan soal imigran gelap yang masuk Indonesia, 15 Juli 2016. https://twitter.com/yusrilihza_mhd?lang=en. Diakses pada 28 Juli 2016.
- Pemerintah Tepis Isu 10 Juta Tenaga Kerja China Masuk Indonesia sumber : news.detik.com edisi Selasa 20 Desember 2016, 18:34 WIB. Kementerian Sekretariat Negara mengklarifikasi isu masuknya 10 juta tenaga kerja asing asal China ke Indonesia yang dimuat dalam akun Twitter resmi Kemensetneg@KemensetnegRI <https://twitter.com/kemensetnegri?lang=en>. Diakses 20 Desember 2016.